

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan penduduk paling padat ke-4 di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Pada tahun 2014, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 253 juta orang. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam (Kementerian Luar Negeri RI, 2018).

Selain jumlah penduduknya yang besar, luasnya negara kepulauan dan tidak meratanya penduduk membuat Indonesia semakin banyak mengalami permasalahan terkait dengan hal kependudukan. Tingginya laju pertumbuhan penduduk membuat penambahan jumlah penduduk semakin meningkat. Sensus oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 didapat bahwa penduduk Indonesia berjumlah 270,20 juta jiwa dengan kepadatan penduduknya yaitu 141 jiwa/km² dan selama periode 2010-2020, dapat diambil angka bahwa rata-rata laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,25% (BPS RI, 2022).

Jumlah penduduk yang besar, tentunya membuat pemerintah semakin sulit untuk mengatur dan menyediakan berbagai fasilitas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Kondisi ini terjadi apabila masyarakat tersebut menjadi beban pemerintah. Akan tetapi bagaimana bila masyarakat tersebut menjadi agen yang membantu pemerintah meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kondisi seperti itu, tentunya memiliki banyak anak tidak masalah. Permasalahan dalam kepemilikan jumlah anak adalah “apakah orang tua dapat memberikan pendidikan, makanan yang bergizi dan lain sebagainya sehingga dapat melahirkan

generasi yang tangguh". Masyarakat tersebut berada pada kondisi di mana mengalami kesulitan secara ekonomi, pendidikan yang rendah (Badrujaman, 2008).

Antropologi pembangunan memandang pembangunan dalam dimensi kultural sebagai "sumber daya manusia". Dalam membentuk kualitas sumber daya manusia yang baik maka diperlukan membangun mentalitas manusianya terlebih dahulu. Antropologi mempelajari manusia dan segala aspeknya. Antropologi berperan memecahkan masalah manusia yang berkaitan dengan pembangunan. Antropologi dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh untuk membuat kebijakan pada suatu permasalahan pada pembangunan Indonesia dan ikut serta dalam perencanaan program pemerintah. Antropologi harus bekerja dalam seluruh tahap proyek pembangunan. Ada tahap yang harus dilakukan yaitu meneliti, mencari, dan menentukan kebutuhan masyarakat. Memformulasikan kebijakan dan memilih alternatif solusi atas masalah yang dihadapi masyarakat. Merencanakan dan melaksanakan proyek sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan. Antropologi dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh untuk membuat kebijakan pada suatu permasalahan pada pembangunan Indonesia dan ikut serta dalam perencanaan program pemerintah (Marzali, 2005).

Pemerintah lalu mencanangkan adanya Program Keluarga Berencana (KB) yang dimungkinkan dapat mengatasi adanya kepadatan penduduk. Selain itu juga bisa mengurangi kemiskinan, karena pertumbuhan penduduk yang banyak tetapi tidak didukung dengan Sumber Daya Manusia yang tinggi maka akan menyebabkan kepincangan dalam perekonomian. Program KB secara umum mempunyai tujuan untuk turut menciptakan kesejahteraan ekonomi dan sosial

bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini melalui usaha perencanaan dan pengendalian penduduk agar tercapai keseimbangan yang baik dengan kemajuan produksi nasional sebagaimana diharapkan melalui pembangunan nasionalnya.

Selain permasalahan kesejahteraan keluarga, kenaikan pertumbuhan penduduk ini tentunya membawa dampak negatif bagi masyarakat Indonesia. Salah satu dampak negatif tersebut contohnya adalah permasalahan kesehatan, seperti *stunting*. Statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2020 mencatat, lebih dari 149 juta (22%) balita di seluruh dunia mengalami *stunting*. Saat ini, prevalensi *stunting* di Indonesia sebesar 21,6%, sementara target yang ingin dicapai adalah 14% pada 2024. Provinsi Aceh sendiri merupakan provinsi dengan prevalensi balita *stunting* tertinggi kelima di Indonesia pada tahun 2022. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi balita *stunting* di provinsi ini sebesar 31,2% pada tahun 2023. Kota Lhokseumawe sendiri menempati peringkat ke-15 dengan angka balita *stunting* 28,1% (Annur, 2023).

Permasalahan tersebut membuat pemerintah berupaya bersama untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Salah satunya dimulai dari unit terkecil dalam masyarakat, yakni keluarga. Antropologi sendiri berperan memecahkan masalah manusia yang berkaitan dengan pembangunan. Melihat permasalahan di atas maka pemerintah membuat program pembangunan yang mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunannya. Dikarenakan Program KB juga dirasa masih kurang signifikan dalam mengatasi permasalahan naiknya populasi penduduk, kesejahteraan keluarga dan permasalahan *stunting*, oleh karena itu Presiden Joko Widodo sesuai dalam nawacita yaitu memprioritaskan pembangunan dari

pinggiran. Maka pada tahun 2016 dibuatlah program kebijakan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB), di mana program tersebut merupakan sebuah program dari BKKBN (Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional). Program ini bertujuan agar taraf kehidupan penduduk di tingkat kampung atau yang setara mengalami peningkatan taraf kehidupan (BKKBN, 2023).

Pembentukan dan pelaksanaan Kampung KB diamanatkan kepada BKKBN dengan memperhatikan prinsip bahwa Kampung KB adalah hasil dari sinergi beberapa pihak terkait. Pihak-pihak tersebut meliputi kementerian, pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta sebagai mitra pemerintah, pemangku kepentingan, serta partisipasi masyarakat. Kampung KB sangat penting untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk serta menggali dan mengembangkan potensi masyarakat agar dapat berkontribusi dalam pembangunan nasional. Dengan dukungan dan partisipasi masyarakat, Program Kampung KB ini akan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan esensi dari pembentukannya.

Sejak dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Januari 2016, Kampung KB terus tumbuh pesat. Semangat membentuk dan mendirikan Kampung KB di seluruh Nusantara telah menghasilkan ratusan Kampung KB. Hingga April 2017, Kampung KB yang sudah terbentuk berjumlah 633 kampung. Masih ada sekitar 9 bulan lagi untuk mengejar sekitar 6000 Kampung KB (KOMINFO RI, 2017).

Dengan dibentuknya Program Kampung KB untuk menangani isu-isu kependudukan, kesejahteraan keluarga, dan masalah *stunting* di setiap desa, peran

pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah bertanggung jawab dalam mengimplementasikan dan memberikan layanan untuk mengembangkan program tersebut. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Lhokseumawe adalah salah satu lembaga pemerintah daerah yang turut melaksanakan Program Kampung KB. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian berjudul “Peran Pemerintah dalam Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) di Kota Lhokseumawe”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Lhokseumawe dalam memberikan layanan untuk mengimplementasikan Program Kampung KB di kota tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka, peneliti dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa dan bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam implementasi Program Kampung KB di Kota Lhokseumawe?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk menjalankan peranannya dalam implementasi Program Kampung KB di Kota Lhokseumawe?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam merealisasikan program Kependudukan, KB dalam implementasi Program Kampung KB di Kota Lhokseumawe.
2. Mengetahui apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk menjalankan peranannya dalam implementasi Program Kampung KB di Kota Lhokseumawe

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang akan didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu Antropologi khususnya pengayaan materi pada sub bidang Antropologi Pembangunan, Antropologi Kependudukan dan Antropologi Kesehatan. Di saat bersamaan hasil penelitian ini sekaligus dapat memberikan gambaran tentang peran pemerintah yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam program pembangunan yaitu implementasi Program Kampung KB di Kota Lhokseumawe.

2. Manfaat praktis

Secara praktik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan regulasi terkait implementasi Program Kampung KB di daerah lain. Hal ini sesuai dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), memberdayakan, dan memperkuat institusi keluarga melalui optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di setiap desa/kelurahan.